

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Anwar, Yesmil. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budhijanto, Danriyanto. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw and Cybersecurity*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Chazawi, Adam. (2002). *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chitra Imelda. Et. al. (2025). *Transformasi Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera
- David M. Douglas. (2016). “*Doxing: a conceptual analysis*”. *Ethics and Information Technology*.
- Gunadi, Ismu. Et. al. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Imran, M. Fadil. (2022). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Inovasi Pratama Internasional
- Lamintang, P.A.F. (2019). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2011). *Hukum Panitensier*. Bangung: PT. Refikaa Aditama.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nurbayani, Siti & Sri Wahyuni. (2023), *Victim Blaming in Rape Culture (Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus*. Malang: Unisma Press
- Nurul Qamar. et. al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar. Cv. Social Politics Genius.
- Poernomo, Bambang. (1992). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purwanto. (2007). *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM.
- Rahardjo, Satjipto (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. (2023). *Kajian Gender: Berprespektif Budaya Patriarki*, Malang: UB Press
- Waluyo, B. (2018). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Angelita, Valerie. & Varsha, S. A. C. S. (2024). *Dampak Sosial Doxing Terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024*. Vol. 8 No. 1.
- DOI: <https://doi.org/10.20956/jl.v8i1.41972>

Erika, S. L. et. al. (2020). *Potensi Remaja Laki-Laki Di Kota Malang Untuk Menjadi Pelaku Kejahatan Seksual Dikaitkan Dengan Faktor Harga Diri Remaja Laki-Laki*. Jurnal Paramadina. Vol. 11. No. 2.

DOI: 10.51353/inquiry.v11i2.364

Fauzi, M. Fisal & Romi Mesra. (2024) *Analisa Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*, Jurnal Studi Sosiologi, Volume 1, No. 3, July, 2024

DOI: [10.47435/jpdk.v7i2.1318](https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318)

Hidayah, Gufron Rosadi, Djazim M., & M. Awaluddin. (2025). *Studi Komparatif Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022*. Vol. 4 No. 4

DOI: <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i4.6341>

Latumahina, R. E. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*. Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya. Vol. 3. No. 2.

Lippi. Glorya C, Jolanda K. & Hervian Y. R.. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Pemerkosaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Vol. 15 No. 4 (2025): Lex Privatum

Mahira, D. F. et. Al. (2020). *Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*. Jurnal Legislatif. Vol. 3 No. 2.

DOI: <https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10472>

Nurul Qamar. Et. al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar. Cv. Social Politics Genius.

- Purwanti, Ani & Marzellina Hardiyanti. (2018). *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*, Vol. 47 No. 2
DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Putri, Widyani. (2022). *Kajian Antropologi Hukum: Dibalik Fenomena Pengungkapan Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Di Media Sosial*. Volume 9 Edisi III. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16325>
- Rahmawati, Nur Ainiyah. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium*, Vol. 2 No. 1
DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>
- Rochmah, K. U., & Fathul, L. N. (2015). *Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual*. Jurnal Psikologi Tabularasa. Vol. 10. No. 1.
DOI: <https://doi.org/10.26905/jpt.v10i1.245>.
- Sidik, Suyanto. (2013). *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*. Vol. 1 No. 1.
- Satria, M. Kamarulzaman & Hadi Yusuf. (2024). Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol : No : 2 April-Mei 2024.

C. Skripsi

Carvallo, Brigitta Chrisnanda Eka Putri. (2024). *“Penegakan Hukum Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Yang Dilakukan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gultom, David Kristo. (2023). *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan No. 200/PID.SUS)”*. Skripsi. Universitas Kristen Indonesia.

Jayanti, Normalita Dwi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Mulia, M. Albani. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing Dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Penyebaran Data Pribadi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi,

Oktavianti, Teresa Anabela. (2023). *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual.”* Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Sumber Lain-lain

Abdala, Tristo. (2023). *Respon Penegak Hukum Dalam Menerima Laporan Kejahatan Transaksi Elektronik Harus Lebih Cepat*. Monitorday.

<https://monitorday.com/respon-penegak-hukum-dalam-menerima-laporan->

[kejahatan-transaksi-elektronik-harus-lebih-cepat/?utm_source=chatgpt.com](#)

Hukumonline. (2022). *Contoh Data Pribadi Umum dan Spesifik dalam UU PDP*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-lt636e12170b9c0/>

KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data>

KBBI. “Pengertian Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi>

Pratama, Bambang. (2020). *Perspektif UU ITE Dalam Perlindungan Data Pribadi*

Dan Kebutuhan Pengaturannya. Universitas Binus. <https://business-law.binus.ac.id/2020/09/25/perspektif-uu-ite-dalam-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangannya/>

Zailani, Laili. (2025). *Implementasi UU TPKS: Kunci Keadilan Yang Belum*

Diberikan. Kumparan, <https://kumparan.com/laili-zailani/implementasi-uu-tpks-kunci-keadilan-yang-belum-diberikan-24dEINnc7Fp>

Septiani, Dewi. “*Apa itu Doxing dan dampaknya pada privasi online*”.

<https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxxing-dan-dampaknya-pada-privasi->

E. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,
Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2022
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Diundangkan di Jakarta, Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905